

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 295 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ciparay untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ciparay untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN CIPARAY

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Ciparay merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Ciparay untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Ciparay yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Ciparay bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Ciparay dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Ciparay agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Ciparay;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ciparay;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Ciparay.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN CIPARAY

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Ciparay dalam menyusun Renja Kecamatan Ciparay.
(2) Renstra Kecamatan Ciparay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.
b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Ciparay paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Ciparay; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Ciparay.
c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Ciparay dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Ciparay dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Ciparay; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.
e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Ciparay sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN CIPARAY

Pasal 5

(1) Kecamatan Ciparay melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ciparay dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Ciparay sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Ciparay terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Ciparay.
(3) Camat Ciparay menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Ciparay.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CIPARAY

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Ciparay dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Ciparay mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Ciparay dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Ciparay, maka Renstra Kecamatan Ciparay dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Ciparay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Ciparay terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Ciparay.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 295

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 295 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 295 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN CIPARAY
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIPARAY
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa Kepala Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan RPJMD.

Rencana Strategis Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Ciparay serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Hal tersebut menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Ciparay selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Kecamatan Ciparay sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Bandung merespon terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Bandung. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, dituntut bekerja dan berusaha agar bisa melaksanakannya. Dari berbagai usaha untuk mencapainya, tentu saja ada yang berhasil dengan baik, setengah berhasil

bahkan ada yang tidak berhasil. Di sini terlihat bahwa selain kemampuan SDM juga banyak dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan lingkungannya.

Karena kemampuan SDM itu sangat terbatas, bila dibandingkan dengan visinya, maka pemerintah dihadapkan kepada pilihan-pilihan atau alternatif yang ada. Di dalam memilih alternatif inilah kemudian timbul suatu perencanaan strategis agar visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan tahap demi tahap.

Renstra Kecamatan Ciparay merupakan landasan dan pedoman bagi langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan Renstra Kecamatan Ciparay tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);

15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Ciparay adalah untuk memberikan gambaran atas tujuan dan sasaran lima tahunan Kecamatan Ciparay, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung kinerja organisasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 adalah untuk mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Ciparay serta visi dan misi Bupati Bandung melalui perencanaan terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Kabupaten Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Renstra ini disajikan dokumen yang bersikap strategis dan merupakan gambaran tugas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029 sebagai upaya untuk perbaikan pelaksanaan tugas di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Renstra Kecamatan Ciparay tahun 2025-2029 dapat diuraikan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Kecamatan Ciparay.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029.

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIPARAY

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ciparay

Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Kecamatan Ciparay

(Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota)

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Ciparay

2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ciparay

2.1.3.1 Data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Ciparay

2.1.3.2 Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020-2024

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Ciparay 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).

2.1.3.3 Penyajian hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Ciparay pada Renstra Tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan (capaian hingga tahun 2024).

Menyajikan data-data dan informasi terkait hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan Renstra tahun 2021-2026 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Ciparay

2.1.5 Mitra Kecamatan Ciparay dalam pemberian pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ciparay

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Kecamatan Ciparay

2.2.5 Permasalahan pelayanan Kecamatan Ciparay

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Kecamatan Ciparay dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Kecamatan Ciparay, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Kecamatan Ciparay. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

2.2.6 Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Kecamatan Ciparay baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Kecamatan Ciparay. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari: a. permasalahan; b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan c. potensi daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Ciparay yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

- Renstra Kecamatan Ciparay memiliki 1 (satu) tujuan
- Didasarkan pada NSPK dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.2 Sasaran

- Dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu
- Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay serta merupakan intermediate outcome

3.2 Strategi Kecamatan Ciparay dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Kecamatan Ciparay.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Kecamatan Ciparay dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Ciparay dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029

Penyajian lokus Renstra Kecamatan Ciparay untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ciparay.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Ciparay

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIPARAY

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ciparay

Kecamatan Ciparay merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung dengan jumlah desa terbanyak yaitu 14 (empat belas) desa. Kecamatan Ciparay merupakan salah satu kawasan dengan jumlah penduduk tinggi dan tingkat kepadatan yang cukup signifikan di Kabupaten Bandung.

Kecamatan Ciparay merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik. Akses pelayanan di Kecamatan Ciparay berupa pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan KTP, KK, Akta Kelahiran, domisili, Surat Pindah dan lain sebagainya. Pelayanan tersebut ditunjang pula oleh layanan berbasis digital dan integrasi dengan Disdukcapil Kabupaten Bandung, sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai diwujudkan dalam ruang Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang mencakup pengurusan berbagai macam pelayanan hingga pengaduan Masyarakat.

Selain pelayanan di bidang kependudukan, Kecamatan Ciparay juga memberikan pelayanan di bidang sosial seperti rekomendasi bantuan-bantuan bagi masyarakat miskin, pengurusan SKTM, proposal-proposal kaitan dengan sosial dan keagamaan; di bidang pertanahan; di bidang pemberdayaan seperti halnya rekomendasi Izin Usaah Mikro Kecil (IUMK), Surat Keterangan Usaha (SKU); di bidang ketentraman dan ketertiban umum seperti rekomendasi izin keramaian, pengantar Surat Keterangan Catatan kepolisian, rekomendasi domisili ormas, Yayasan atau Lembaga, dan lain sebagainya.

Kecamatan Ciparay dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Bandung selalu melaksanakan pembinaan ke desa-desa secara signifikan dan berkelanjutan, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan teknis dan administratif perangkat desa; mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan transparan; desa dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat kepada warganya; desa mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan dengan lebih baik; meningkatkan kualitas penggunaan dana desa dan alokasi anggaran lainnya; menjadikan desa-desanya menjadi kategori desa mandiri.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ciparay

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan dipimpin oleh camat. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Camat mempunyai fungsi:

a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan, yaitu:

a. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Sosial Budaya;
f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
g. Jabatan Fungsional

Perangkat Kecamatan tersebut, masing-maisng memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu:

a. Sekretaris Kecamatan

    Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan

kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
- penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan membawahkan Subbagian Program dan keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Program dan keuangan

   Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

   - penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
   - pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
   - pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
   - penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
   - pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
   - pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
   - pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan; dan

- pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

   Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

   - penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
   - pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
   - pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
   - pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   - pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
   - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan;

   Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

   - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
   - penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
   - pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   - pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

d. Seksi Pembangunan;

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

e. Seksi Sosial Budaya;

Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;

- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

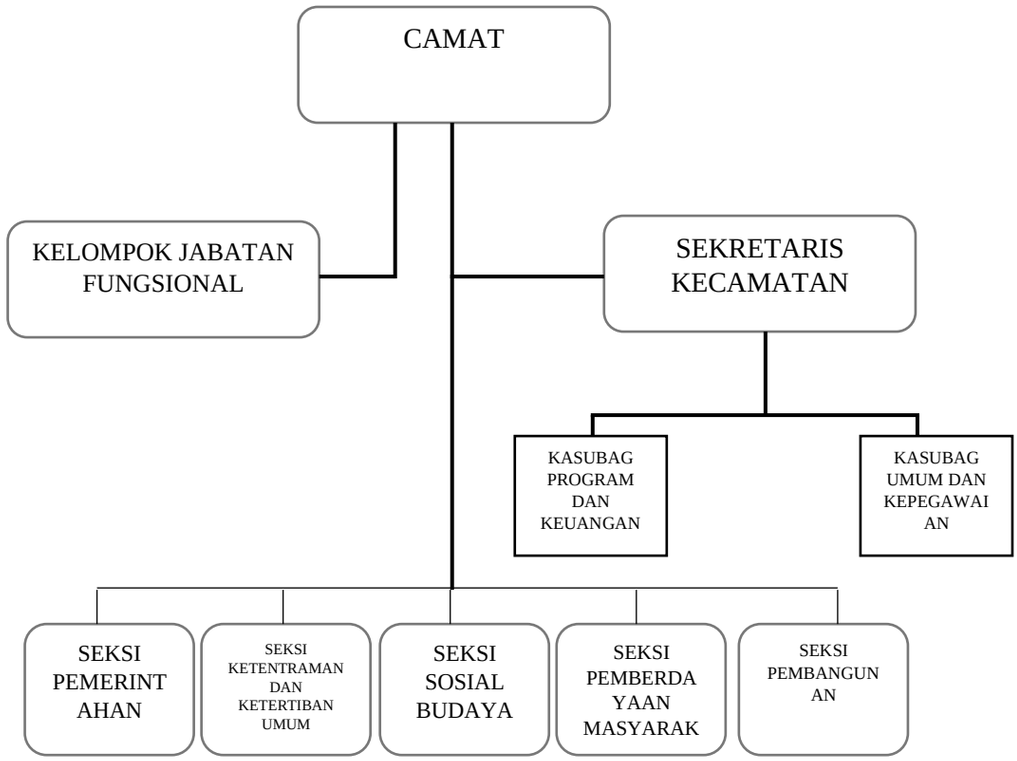
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

g. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Camat

Berikut adalah bagan struktur organisasi Kecamatan Ciparay

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber: Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ciparay

Kecamatan Ciparay merupakan satu dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung yang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik didukung oleh 14 desa yaitu: Desa Ciparay, Desa Sarimahi, Desa Sumbersari, Desa Serangmekar, Desa Manggungharja, Desa Pakutandang, Desa Mekarsari, Desa Ciheulang, Desa Bumiwangi, Desa Gunungleutik, Desa Cikoneng, Desa Sagaracipta, Desa Babakan, dan Desa Mekarlaksana.

Sumber daya yang ada di Kecamatan Ciparay terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Ciparay. Kecamatan Ciparay juga didukung oleh ruang pelayanan yang baik sehingga masyarakat yang memerlukan pelayanan merasa nyaman disertai dukungan aparatur pelayanan yang mumpuni. Selain itu, aset kondisi baik juga membantu kelancaran pelayanan publik dan kinerja Kecamatan Ciparay, yaitu:

Tabel 2.1

Aset Kecamatan Ciparay

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Lemari besi	15 unit
2.	Lemari kayu	11 unit
3.	Rak besi	1 unit
4.	Meja kerja	20 unit
5.	Meja rapat	4 unit
6.	Televisi	5 unit
7.	Sepeda motor	9 unit
8.	CCTV	3 unit
9.	Kursi tamu	26 unit
10.	Kursi putar	17 unit
11.	Mini bus/roda 4	3 unit
12.	*Filling cabinet*	9 unit
13.	sofa	5 unit
14.	AC	7 unit
15.	*Sound system*	5 unit
16.	Kursi lipat	145 unit
17.	PC unit	9 unit
18.	Meja kerja	12 unit
19.	laptop	14 unit
20.	*Scanner printer*	3 unit
21.	torca	1 unit
22.	*microphone*	2 unit

Sumber: Aset Kecamatan Ciparay, 2025

Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Ciparay berjumlah 18 orang, terdiri dari 8 Pejabat struktural (sekcam masih PLT), 12 staf pelaksana (9 PNS, 1 CPNS dan 2 PPPK). Selain itu terdapat pula 4 tenaga harian lepas.

Tabel 2.2

Status Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin pada Kantor Kecamatan Ciparay

No.	PNS/Non PNS	Laki-Laki	Perempuan
1	PNS	9	9
2	Non PNS	4	2
JUMLAH		13	11

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Ciparay, Agustus 2025

Tabel 2.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nama	Laki-Laki	Perempuan
1. Pasca Sarjana/S2	1	1
2. Sarjana/S-1	3	10
3. Diploma III	4	0
4. SMA/SLTA	2	0
5. SMP/SLTP	3	0
6. SD	0	0
Jumlah	13	11

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Ciparay, Agustus 2025

Selain dari faktor sumber daya manusia, berjalannya suatu organisasi juga bergantung dari ketersediaan dana atau anggaran yang dibutuhkan. Semakin terpenuhinya kebutuhan anggaran dari organisasi tersebut, maka semakin memudahkan organisasi tersebut melaksanakan tugas untuk mencapai tujuannya.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Ciparay

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Ciparay

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerbitkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Untuk pelaksanaan kewenangan Kecamatan Ciparay yang yang merupakan urusan wajib adalah kesehatan, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga, koperasi dan usaha kecil menengah, Administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, pariwisata, kebudayaan,dan pertanahan. Selain hal tersebut di atas, kecamatan melaksanakan pelayanan publik langsung terhadap masyarakat antara lain: non perizinan/administrasi kependudukan dan lainnya, memberikan rekomendasi terhadap proposal ataupun pelayanan lainnya, melaksanakan program kewilayahan, menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat kaitan dengan pelayanan, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat melalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Kecamatan Ciparay memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah desa sebanyak 14 (empat belas) desa yang terdiri dari :

1. Desa Sumbersari
2. Desa Ciheulang
3. Desa Mekarsari
4. Desa Bumiwangi
5. Desa Serangmekar
6. Desa Sarimahi
7. Desa Babakan
8. Desa Magungharja
9. Desa Sagaracipta
10. Desa Pakutandang
11. Desa Cikoneng
12. Desa Ciparay
13. Desa Mekarlaksana
14. Desa Gunungleutik

Gambar 2.2
Peta Wilayah Kecamatan Ciparay



Sumber: Profil Kecamatan Ciparay, 2025

Kecamatan Ciparay merupakan wilayah yang dekat dengan alur perlintasan antar kecamatan, dengan batasan-batasan wilayah, adalah sebagai berikut :

Utara : Kecamatan Bojongsoang
Selatan : Kecamatan Arjasari dan Kecamatan Kertasari
Timur : Kecamatan Majalaya
Barat : Kecamatan Baleendah

Data demografi Kecamatan Ciparay adalah informasi statistik yang menggambarkan karakteristik penduduk di suatu wilayah kecamatan. Data ini penting untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan. Komponen utama data demografi yaitu penduduk, distribusi usia, jenis kelamin, Pendidikan, dan kepadatan penduduk.

Penduduk merupakan bagian penting dari sebuah komponen perencanaan pembangunan. Maka kependudukan merupakan salah satu isu penting dalam perencanaan maupun evaluasi hasil Pembangunan. Berbagai indikator kependuduk dapat digunakan untuk melihat kondisi suatu wilayah, seperti adanya laju pertumbuhan, kepadatan penduduk, penduduk menurut kelompok serta indikator-indikator lainnya. Dari berbagai indikator tersebut maka masalah kependudukan didalam proses pembangunan dapat

diidentifikasi dan dievaluasi. Pada tabel berikut adalah jumlah penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut desa di Kecamatan Ciparay tahun 2025.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Kecamatan Ciparay Tahun 2025

Desa	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Babakan	4.589	4.429	9.018
Cikoneng	4.040	3.932	7.972
Sagaracipta	5.165	4.980	10.145
Pakutandang	10.205	9.954	20.159
Manggungharja	7.030	6.796	13.826
Mekarsari	7.125	6.772	13.897
Ciparay	4.303	4.220	8.523
Sumbersari	9.633	9.247	18.880
Sarimahi	5.554	5.302	10.856
Serangmekar	6.678	6.358	13.036
Gunungleutik	6.403	6.278	12.681
Ciheulang	9.281	8.873	18.154
Mekarlaksana	5.810	5.491	11.301
Bumiwangi	9.530	9.077	18.607
TOTAL	95.346	91.709	187.055

Sumber: Kecamatan Ciparay dalam Angka Tahun 2025

Kecamatan Ciparay secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan, perbandingannya adalah 50,97% dari total penduduk Kecamatan Ciparay. Secara umum, penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan selisih sekitar 3.637 jiwa.

Sebaran penduduk di tiap desa menunjukkan bahwa Desa Pakutandang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni 20.159 jiwa, disusul oleh Sumbersari (18.880 jiwa) dan Bumiwangi (18.607 jiwa). Ketiga desa ini berkontribusi besar terhadap total populasi kecamatan. Sementara itu, Desa Cikoneng memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 7.972 jiwa, sedikit di atas Ciparay (8.523 jiwa) dan Babakan (9.018 jiwa).

Distribusi penduduk ini menunjukkan adanya konsentrasi yang cukup tinggi di beberapa desa, terutama yang mungkin memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas publik, ekonomi, atau infrastruktur. Rasio jenis kelamin relatif seimbang di semua desa, dengan komposisi yang tidak menunjukkan perbedaan ekstrem.

Tabel 2.5

Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan

Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2025

Desa/Kelurahan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	Rasio Jenis Kelamin
Babakan	4.82	921	103.61
Cikoneng	4.26	3,017	102.75
Sagaracipta	5.42	3,865	103.71
Pakutandang	10.78	6,785	102.52
Manggungharja	7.39	8,498	103.44
Mekarsari	7.43	979	105.21
Ciparay	4.56	2,923	101.97
Sumbersari	10.09	2,195	104.17
Sarimahi	5.80	3,4	104.75
Serangmekar	6.97	4,87	105.03
Gunungleutik	6.78	17,09	101.99
Ciheulang	9.71	3,947	104.60
Mekarlaksana	6.04	1,792	105.81
Bumiwangi	9.95	3,883	104.99
Total	100	2,764	103.97

Sumber: Kecamatan Ciparay dalam Angka Tahun 2025

Jumlah total penduduk Kecamatan Ciparay mencapai 187.055 jiwa, tersebar di 14 desa. Dari total ini, sebaran dan karakteristik penduduk menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah.

- Distribusi Persentase Penduduk

  Tiga desa dengan persentase penduduk terbesar adalah:

  - Pakutandang: 10,78%
  - Sumbersari: 10,09%
  - Bumiwangi: 9,95%

  Ketiganya menyumbang hampir sepertiga dari total populasi kecamatan, mencerminkan wilayah-wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi.

  Sementara itu, desa dengan persentase terkecil adalah:

  - Cikoneng: 4,26%
  - Ciparay: 4,56%
  - Babakan: 4,82%

- Kepadatan Penduduk

  Tingkat kepadatan penduduk tertinggi tercatat di:

  - Gunungleutik: 17.090 jiwa/km²
  - Manggungharja: 8.498 jiwa/km²
  - Sagaracipta: 3.865 jiwa/km²

Ini mengindikasikan kemungkinan area yang lebih urban atau padat pemukiman. Sebaliknya, kepadatan penduduk terendah ada di:

- Babakan: 921 jiwa/km²
- Mekarsari: 979 jiwa/km²
- Mekarlaksana: 1.792 jiwa/km²

Desa-desa dengan kepadatan rendah kemungkinan memiliki lahan lebih luas atau berorientasi pada pertanian/perdesaan.

- Rasio Jenis Kelamin

Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin Kecamatan Ciparay adalah 103,97, artinya terdapat sekitar 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Rasio tertinggi terdapat di:

- Mekarlaksana: 105,81
- Mekarsari: 105,21
- Serangmekar: 105,03

Sementara yang paling seimbang (mendekati 100) adalah:

- Ciparay: 101,97
- Gunungleutik: 101,99
- Pakutandang: 102,52

Kecamatan Ciparay menunjukkan karakteristik wilayah yang beragam, baik dari segi persebaran penduduk, kepadatan, maupun komposisi jenis kelamin. Wilayah seperti Gunungleutik dan Manggungharja patut dicermati lebih lanjut sebagai pusat kepadatan penduduk, sementara desa seperti Pakutandang, Sumbersari, dan Bumiwangi menjadi kontributor utama terhadap total populasi kecamatan.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Ciparay

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
00-04	5,894	5,521	11,415
10-14	8,318	7,947	16,265
15-19	8,659	8,257	16,916
15-19	8,056	7,743	15,799
20-24	8,476	8,026	16,502
25-29	7,869	7,258	15,127
30-34	7,518	6,872	14,39
35-39	6,255	5,902	12,157
40-44	7,131	6,825	13,956
45-49	6,593	6,614	13,207
50-54	5,752	5,774	11,526
55-59	4,588	4,555	9,143
60-64	3,556	3,722	7,278
65-69	2,792	2,73	5,522
70-74	1,919	1,787	3,706
75+	1,97	2,176	4,146
Total	95,346	91,709	187,055

Sumber: Kecamatan Ciparay dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kecamatan Ciparay mencapai 187.055 jiwa, yang terdiri dari 95.346 laki-laki dan 91.709 perempuan. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok produktif (15–64 tahun) mendominasi jumlah penduduk.

Kelompok usia dengan jumlah penduduk terbanyak adalah:

- 10–14 tahun: 16.916 jiwa
- 20–24 tahun: 16.502 jiwa
- 05–09 tahun: 16.265 jiwa

Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) jumlahnya relatif lebih sedikit:

- 65–69 tahun: 5.522 jiwa
- 70–74 tahun: 3.706 jiwa
- 75+ tahun: 4.146 jiwa

Distribusi ini menunjukkan struktur penduduk yang masih muda dan potensial dari segi produktivitas, namun juga mengindikasikan perlunya perencanaan untuk layanan lansia di masa mendatang.

Tabel 2.7

Jumlah dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2025

Jumlah Penduduk							Rata-Rata Laju pertumbuhan Penduduk
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
174.378	172.589	174.103	175.914	177.677	179.350	187.055	1,19

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Dalam kurun waktu tujuh tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2025, jumlah penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sebanyak 156.795 jiwa. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 187.055 jiwa pada tahun 2025. Peningkatan tertinggi terjadi antara tahun 2019 dan 2020, dengan lonjakan sebesar 15.795 jiwa, mencerminkan dinamika demografis yang kuat di awal dekade. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024 (dari 180.480 menjadi 179.362 jiwa), tren keseluruhan tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Secara keseluruhan, rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama periode 2019–2025 adalah sebesar 3,04% per tahun, yang mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.

Tabel 2.8

Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2026-2029

Kecamatan	2026	2027	2028	2029
Ciparay	190.534	194.078	197.688	201.365

Sumber: Hasil Analis Kecamatan Ciparay, 2025

Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk Kecamatan Ciparay menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2026, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 190.534 jiwa, dan akan terus meningkat hingga 201.365 jiwa pada tahun 2029. Artinya, dalam kurun waktu empat tahun, terjadi penambahan sekitar 10.831 jiwa, atau rata-rata pertumbuhan sekitar 2,8% per tahun. Peningkatan ini mencerminkan dinamika demografis yang aktif, baik dari segi kelahiran, migrasi masuk, maupun peningkatan kualitas hidup yang mendorong pertumbuhan populasi.

Untuk mengantisipasi dampak dari pertumbuhan penduduk tersebut, tentu saja Kecamatan Ciparay harus melakukan persiapan kaitan dengan laju pertumbuhan penduduk mendatang, misalnya perluasan dan perbaikan jalan, serta pengembangan transportasi umum yang efisien; program pembangunan rumah layak huni untuk menghindari kepadatan dan kawasan kumuh, penambahan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan

klinik, serta peningkatan tenaga medis; pembangunan sekolah baru dan peningkatan kualitas guru untuk menampung generasi muda yang terus bertambah; sistem pengelolaan limbah yang modern dan edukasi masyarakat tentang kebersihan; pelestarian dan penambahan taman serta area hijau untuk menjaga kualitas udara dan keseimbangan ekosistem; pengembangan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja untuk menyerap tenaga kerja local, modernisasi pasar tradisional dan dukungan terhadap ekonomi digital; serta pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik, data kependudukan, dan sistem informasi desa yang terintegrasi.

Sebagai dasar antisipasi laju penduduk disandingkan dengan fasilitas Pendidikan di Kecamatan Ciparay, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ciparay, 2023/2024 dan 2024/2025

Tingkat Pendidikan	Negeri 2023/2024	Negeri 2024/2025	Swasta 2023/2024	Swasta 2024/2025	Total 2023/2024	Total 2024/2025
Taman Kanak-Kanak (TK)	0	0	20	25	20	25
Raudhatul Athfal (RA)	2	0	59	0	61	0
Sekolah Dasar (SD)	61	61	6	6	67	67
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1	0	16	0	17	0
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	3	21	21	24	24
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	1	14	14	15	15
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	1	10	10	11	11
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0	0	5	5	5	5
Madrasah Aliyah (MA)	1	0	8	0	9	0

Sumber: Kecamatan Ciparay Dalam Angka Tahun 2025

Data pendidikan menunjukkan dinamika jumlah lembaga pendidikan negeri dan swasta di berbagai jenjang. Pada jenjang pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-Kanak (TK) seluruhnya dikelola oleh swasta, dengan peningkatan dari 20 menjadi 25 unit. Raudhatul Athfal (RA) mengalami penurunan drastis,

dari total 61 unit (2 negeri dan 59 swasta) menjadi nihil pada tahun ajaran 2024/2025.

Jenjang Sekolah Dasar (SD) menunjukkan stabilitas, dengan 61 sekolah negeri dan 6 swasta tetap aktif di kedua tahun ajaran. Madrasah Ibtidaiyah (MI) mengalami penurunan, dari 17 unit menjadi 0, yang menunjukkan kemungkinan penutupan atau penggabungan lembaga.

Pada tingkat menengah pertama, SMP dan MTs menunjukkan konsistensi, masing-masing mempertahankan jumlah 24 dan 15 unit. Hal serupa terjadi pada jenjang menengah atas, di mana SMA, SMK, dan MA tidak mengalami perubahan signifikan, meskipun MA dan MI menunjukkan penurunan jumlah sekolah negeri dan swasta di tahun ajaran 2024/2025.

Tabel 2.10

Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ciparay, 2023/2024 dan 2024/2025

Tingkat Pendidikan	Negeri 2023/2024	Negeri 2024/2025	Swasta 2023/2024	Swasta 2024/2025	Jumlah/Total 2023/2024	Jumlah/Total 2024/2025
Taman Kanak-Kanak (TK)	–	–	948	962	948	962
Raudatul Athfal (RA)	–	–	2.782	–	2.782	–
Sekolah Dasar (SD)	15.388	15.332	1.273	1.276	16.661	16.608
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	447	–	2.118	–	2.565	–
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2.926	3.105	5.735	5.597	8.661	8.702
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	985	–	1.574	–	2.559	–
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.302	1.313	4.163	4.085	5.465	5.398
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	–	–	1.129	1.136	1.129	1.136
Madrasah Aliyah (MA)	796	–	999	–	1.795	–

Sumber Kecamatan Ciparay dalam Angka, 2025

Secara umum, data menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah masih didominasi oleh sekolah negeri, sementara pendidikan anak usia dini dan kejuruan lebih banyak diselenggarakan oleh lembaga

swasta. Meskipun terdapat fluktuasi jumlah siswa di beberapa jenjang, tren pertumbuhan relatif stabil.

Kecamatan Ciparay memiliki potensi di sektor pertanian, industri rumahan (*home industry*), dan pariwisata, serta memiliki lokasi strategis di Kabupaten Bandung yang dapat mendukung pengembangan wilayahnya.

Kecamatan Ciparay memiliki potensi di bidang pertanian, sejalan dengan sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Potensi pertanian berupa tanaman padi/palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan jasa pertanian. Komoditas unggul selain padi di Kecamatan Ciparay yaitu bawang merah, bawang daun dan cabai rawit.

Kecamatan Ciparay memiliki industri rumahan yang menghasilkan berbagai produk kerajinan serta industri makanan ringan. Rengginang menjadi produk unggulan makanan ringan UMKM Kecamatan Ciparay. Selain itu, dendeng sapi, kerupuk galendrong, sebring elod juga menjadi industri makanan ringan yang menyebar di Kecamatan Ciparay.

Terdapat potensi pariwisata di Ciparay yang dapat sedang berkembang, yaitu Curug Cinta di Desa Bumiwangi, Gunung Bukit Cula yang bisa dijadikan tempat paralayang, adanya situs budaya Cula Nagara di Desa Gunungleutik, bendungan Watervang Cirasea di Kecamatan Ciparay, kolam bibit ikan Desa Cikoneng, Kolam Mugi Jaya di Desa Manggungharja, Kolam Tirta Riang di Desa Serangmekar serta Lamping Ciwangi Desa Bumiwangi

Potensi ekonomi lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Ciparay yaitu sudah maraknya rumah makan serta *cafe* yang membantu perekonomian masyakat kecamatan Ciparay. Sebagian besar berada di Desa pakutandang dan Desa Cikoneng. Selain itu adanya bank pemerintah dan swasta yang mendukung kelancaran perekonomian masyarakat dengan jumlah 3 Bank pemerintah yaitu Bank BNI, BRI dan BPR Kertaraharja, adanya 2 bank swasta yaitu Bank Mandiri dan Bank BJB serta 1 BPR swasta yaitu BPR Nusamba.

Hingga saat ini, Kecamatan Ciparay belum memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun *Non-Governmental Organization* (NCO) yang secara aktif beroperasi di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kemitraan resmi antara pemerintah kecamatan dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah yang menjalankan program sosial, pemberdayaan masyarakat, atau pembangunan berbasis komunitas.

Meskipun demikian, potensi kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat tetap terbuka lebar. Pemerintah Kecamatan Ciparay terus mendorong partisipasi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan

berkelanjutan, terutama melalui pendekatan kolaboratif yang dapat memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Pada periode Renstra tahun 2021-2024, Indikator Kecamatan Ciparay yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini juga merupakan sebagai Indikator Kinerja Kunci. Capaian selama periode Renstra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Indikator Kinerja Utama (IKU)
periode Renstra tahun 2021-2024

NO	Indikator	Target tahun				Realisasi tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Nilai IKM	94,80	89,96	89,97	89,98	89,95	89,96	89,97	89,98

Sumber: LKIP Kecamatan Ciparay Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

Pada periode tersebut, pada umumnya Indikator Kinerja Utama dan sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ciparay, tercapai 100%. Namun di tahun 2021, Indikator tersebut tidak tercapai. Hal ini dikarenakan penentuan target yang terlalu tinggi, serta adanya pandemi covid sangat berpengaruh pula terhadap capaian target ini.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Ciparay pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Berikut adalah Hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Ciparay Tahun 2021-2026:

Tabel 2.12

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Ciparay Tahun 2021-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	67,40	68,28	71,00	72,00	68,18	70,01	75,10	77,30
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	6 dokumen
b	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	-	1 Dokumen	2 Dokumen	N/A	-	1 Dokumen	2 Dokumen
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	-	1 Dokumen	2 Dokumen	N/A	-	1 Dokumen	2 Dokumen
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	-	1 Dokumen	2 Dokumen	N/A	-	1 Dokumen	2 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
f	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A	-	1 Dokumen	2 Dokumen	N/A	-	1 Dokumen	2 Dokumen
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4 laporan	4 laporan	6 laporan	-	4 laporan	4 laporan	6 laporan
h	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	8 laporan	6 laporan	6 laporan	6 dokumen	8 laporan	6 laporan	6 laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 ob	264 orang/bulan	264 orang/bulan	228 orang/bulan	264 ob	264 orang/bulan	264 orang/bulan	228 orang/bulan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%				100%				100%
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 dokumen				3 dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 orang				40 orang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis	5 paket	5 paket	5 paket	5 jenis	5 paket	5 paket	5 paket
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 jenis	23 paket	24 paket	28 paket	21 jenis	23 paket	24 paket	28 paket
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 jenis	17 paket	20 paket	18 paket	19 jenis	17 paket	20 paket	18 paket
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 jenis	11 paket	2 paket	2 paket	11 jenis	11 paket	2 paket	2 paket
e	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu								
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 OK	148 laporan	100 laporan	200 laporan	120 OK	148 laporan	100 laporan	200 laporan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 lembar	12 laporan			500 lembar	12 laporan		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 ob	12 laporan	12 laporan	12 laporan	72 ob	12 laporan	12 laporan	12 laporan
6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database	N/A	-	100%	100%	N/A	-	100%	100%
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	-	12 Dokumen		N/A	-	12 Dokumen	
b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	-	4 laporan	4 laporan	N/A	-	4 laporan	4 laporan
c	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	-		4 laporan	N/A	-		4 laporan
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 jenis	3 unit	3 unit	10 unit	1 jenis	3 unit	3 unit	10 unit

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan								
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	10 unit	10 unit	10 unit	5 unit	10 unit	10 unit	10 unit
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 jenis	2 unit	2 unit	2 unit	2 jenis	2 unit	2 unit	2 unit
c	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi								
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	1 unit	1 unit	4 unit	1 paket	1 unit	1 unit	4 unit
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	94,80 poin	89,96 poin	89,97 poin	89,98 poin	89,95 poin	89,96 poin	89,97 poin	89,98 poin

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan.	N/A	-	100%	100%	N/A	-	100%	100%
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	N/A	-	1 laporan	1 laporan	N/A	-	1 laporan	1 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
b	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	-	1 laporan	1 laporan	N/A	-	1 laporan	1 laporan
11	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.	N/A	-	100%	100%	N/A	-	100%	100%
a	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	-	2 Dokumen	2 Dokumen	N/A	-	2 Dokumen	2 Dokumen
12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 dokumen	4 laporan	3 laporan	10 laporan	4 dokumen	4 laporan	3 laporan	10 laporan
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			166 orang	200 orang			166 orang	200 orang
b	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 Dokumen	200 orang			2 Dokumen	200 orang		
c	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	N/A	200 orang	543 orang	600 orang	N/A	200 orang	543 orang	600 orang
d	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	N/A		1 laporan	1 laporan	N/A		1 laporan	1 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	N/A	-			N/A	-		
e	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	N/A	-	4 Dokumen	12 Dokumen	N/A	-	4 Dokumen	12 Dokumen
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	N/A	-	100%	100%	N/A	-	100%	100%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	N/A		100%	100%	N/A		100%	100%
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A		1 laporan	14 laporan	N/A		1 laporan	14 laporan
b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A		1 laporan	12 laporan	N/A		1 laporan	12 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	N/A	-	100%	100%	N/A	-	100%	100%
a	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	-	1 laporan	12 laporan	N/A	-	1 laporan	12 laporan
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	12 laporan	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	12 laporan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
a	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	-	4 lembaga kemasyarakatan		N/A	-	4 lembaga kemasyarakatan	
b	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan			2 unit				2 unit	
c	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan
d	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1 laporan	2 laporan			1 laporan	2 laporan
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A		1 Dokumen	2 Dokumen	N/A		1 Dokumen	2 Dokumen
b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	2 Dokumen			1 dokumen	2 Dokumen		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Target Capaian Setiap tahun				Realisasi Capaian Setiap tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	-	1 Dokumen		2 Dokumen	-	1 Dokumen	
d	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
e	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen		
f	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 dokumen	4 dokumen			3 dokumen	4 dokumen		

Sumber: LKIP Kecamatan Ciparay Tahun 2021, 2022, 2023, 2024

Capaian kinerja dalam indikator program, kegiatan dan sub kegiatan tercapai sesuai target bahkan ada yang melebihi target. Hal ini dikarenakan peningkatan kinerja Kecamatan Ciparay dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu nilai IKM, tahun 2022 sampai 2024 tercapai 100%. Begitu pula halnya dengan Nilai AKIP mencapai di atas target. Tahun 2022 target AKIP adalah 68,28 terealisasi 70,01, sehingga capaian sebesar 102,53%. Di tahun 2023 target nilai AKIP sebesar 71,00 dan terealisasi sebesar 75,10, sehingga capaian sebesar 105,77%. Di tahun 2024, target Nilai AKIP sebesar 72,00, terealisasi 77,30, sehingga capaian Nilai AKIP tahun 2024 adalah 107,36%.

Disini dapat dilihat bahwa Nilai AKIP dari tahun ke tahun semakin baik capaiannya. Keberhasilan nilai IKU (dari indikator Nilai IKM) dan Nilai AKIP disebabkan adanya keselarasan antara perencanaan dan realisasi kinerja, koordinasi yang baik antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pelayanan prima yang telah diberikan kepada masyarakat oleh aparatur kecamatan yang lebih baik. Selain faktor pendorong juga terdapat faktor penghambat yang umum yaitu adanya perubahan dalam perencanaan dan penganggaran.

Tabel 2.13

Hasil Evaluasi Capaian Anggaran Tahun 2021-2024

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	4.641.388.540	5.169.772.200	4.696.912.048	5.103.096.868	3.916.468.844	4.697.033.718	4.318.599.035	4.665.250.023	84,38%	90,86%	91,95%	91,42%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.620.324	53.000.000	23.223.200	31.832.000	815.000	36.173.000	20.541.994	21.316.400	31,10%	68,25%	88,45%	66,97%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.000.000	10.423.400	14.300.000	815.000	660.000	9.028.400	10.689.600	54,33%	66,00%	86,62%	74,75%
Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			771.000	1.168.000			771.000	1.168.000			100,00%	100,00%

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		51.000.000	1.791.000	1.168.000		35.363.000	1.621.000	1.168.000		69,34%	90,51%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			941.000	1.168.000			431.000	828.000			45,80%	70,89%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1.621.000	1.168.000			1.451.000	658.000			89,51%	56,34%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-		6.794.600	10.860.000			6.451.924	5.144.800			94,96%	47,37%

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.120.324	1.000.000	881.200	2.000.000		150.000	787.670	1.660.000	0,00 %	15,00 %	89,39 %	83,00 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	4.091.543.601	4.494.146.000	4.179.597.852	4.326.737.488	3.412.121.960	4.068.302.416	3.843.658.961	3.944.088.479	83,39 %	90,52 %	91,96 %	91,16 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.091.543.601	4.494.146.000	4.179.597.852	4.326.737.488	3.412.121.960	4.068.302.416	3.843.658.961	3.944.088.479	83,39 %	90,52 %	91,96 %	91,16 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%		-	-	24.488.500		-	-	24.408.800				99,67 %
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				500.000				499.800				99,96 %

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				23.988.500				23.909.000				99,67 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	116.339.420	128.725.636	125.993.900	150.059.940	107.104.500	122.251.921	112.860.750	133.808.171	92,06 %	94,97 %	89,58 %	89,17 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.275.810	1.338.238	1.368.500	6.751.000	3.253.500	1.299.000	1.354.200	6.751.000	99,32 %	97,07 %	98,96 %	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60.486.570	95.423.758	81.632.300	80.003.800	57.080.900	90.622.000	81.470.650	79.884.801	94,37 %	94,97 %	99,80 %	99,85 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27.891.040	7.113.640	1.767.100	2.490.140	27.391.600	6.831.500	1.764.900	2.482.370	98,21 %	96,03 %	99,88 %	99,69 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4.400.000	700.000	156.000	700.000	2.911.000	148.421	156.000	700.000	66,16 %	21,20 %	100,00%	100,00%

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	yang Disediakan												
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.286.000	24.150.000	41.070.000	60.115.000	16.467.500	23.351.000	28.115.000	43.990.000	81,18 %	96,69 %	68,46 %	73,18 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah	256.891.100	287.118.000	316.849.096	326.197.440	228.200.984	267.986.870	292.329.530	310.537.067	88,83 %	93,34 %	92,26 %	95,20 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	300.000			150.000	-			4,55 %	0,00 %		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	27.882.720	31.248.000	60.589.096	54.708.440	17.406.536	16.130.198	37.009.530	40.646.386	62,43 %	51,62 %	61,08 %	74,30 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	225.708.380	255.570.000	256.260.000	271.489.000	210.644.448	251.856.672	255.320.000	269.890.681	93,33 %	98,55 %	99,63 %	99,41 %

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database		-	3.413.000	1.000.000	-	-	3.388.000	680.000			99,27%	68,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			3.413.000	1.000.000			3.388.000	680.000			99,27%	68,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	7.350.000	10.000.000	4.635.000	17.180.500	7.350.000	9.735.000	4.635.000	17.070.000	100,00%	97,35%	100,00%	99,36%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.350.000	10.000.000	4.635.000	17.180.500	7.350.000	9.735.000	4.635.000	17.070.000	100,00%	97,35%	100,00%	99,36%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.644.095	196.782.564	43.200.000	225.601.000	160.876.400	192.584.511	41.184.800	213.341.106	96,54%	97,87%	95,34%	94,57%

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12.740.000	22.850.000	35.930.000	54.680.000	10.826.400	19.239.400	34.069.300	43.071.700	84,98 %	84,20 %	94,82 %	78,77 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.110.000	3.950.000	2.680.000	2.720.000	2.100.000	3.850.000	2.615.500	2.680.000	99,53 %	97,47 %	97,59 %	98,53 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	151.794.095	169.982.564	4.590.000	168.201.000	147.950.000	169.495.111	4.500.000	167.589.406	97,47 %	99,71 %	98,04 %	99,64 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	45.541.401	153.732.000	142.117.540	469.675.000	43.177.500	141.358.900	140.129.300	465.125.220	94,81 %	91,95 %	98,60 %	99,03 %
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	16.071.501	11.000.000	6.909.000	3.900.000	13.890.000	10.823.000	6.777.000	3.846.000	86,43 %	98,39 %	98,09 %	98,62 %

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2.763.000	1.950.000			2.703.000	1.914.000	#DIV/0!		97,83 %	98,15 %
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.071.501	11.000.000	4.146.000	1.950.000	13.890.000	10.823.000	4.074.000	1.932.000	86,43 %	98,39 %	98,26 %	99,08 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada		-	5.874.120	7.334.600	-	-	5.867.200	7.268.200			99,88 %	99,09 %

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	masyarakat di kecamatan.												
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			2.937.060	3.250.000			2.935.600	3.220.000			99,95 %	99,08 %
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.937.060	4.084.600			2.931.600	4.048.200			99,81 %	99,11 %
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.		14.184.000	42.507.000	49.529.000		14.101.000	42.305.400	49.367.400		99,41 %	99,53 %	99,67 %

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		14.184.000	42.507.000	49.529.000		14.101.000	42.305.400	49.367.400		99,41 %	99,53 %	99,67 %
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan.	29.469.900	128.548.000	86.827.420	408.911.400	29.287.500	116.434.900	85.179.700	404.643.620	99,38 %	90,58 %	98,10 %	98,96 %
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.469.900	128.548.000	86.827.420	408.911.400	29.287.500	116.434.900	85.179.700	404.643.620	99,38 %	90,58 %	98,10 %	98,96 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang	9.450.700	54.142.800	66.197.540	121.672.000	8.125.000	53.935.000	65.314.500	120.653.799	85,97 %	99,62 %	98,67 %	99,16 %

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	ditugaskan kepala daerah												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	9.450.700	54.142.800	66.197.540	121.672.000	8.125.000	53.935.000	65.314.500	120.653.799	85,97 %	99,62 %	98,67 %	99,16 %
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			13.056.000	30.692.000			12.876.000	30.501.100			98,62 %	99,38 %
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	9.450.700	14.472.800			8.125.000	14.465.000			85,97 %	99,95 %		

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		39.670.000	26.850.000	62.360.000		39.470.000	26.439.700	61.622.699		99,50 %	98,47 %	98,82 %
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			2.619.540	3.424.000			2.561.800	3.394.000			97,80 %	99,12 %
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.			23.672.000	25.196.000			23.437.000	25.136.000			99,01 %	99,76 %
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban		10.080.000	35.197.000	61.972.666	-	9.788.000	34.609.000	59.619.837		97,10 %	98,33 %	96,20 %

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	umum												
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.			28.294.000	46.814.666	-	-	27.787.600	46.440.637			98,21 %	99,20 %
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			3.900.000	20.878.666			3.828.000	20.801.437			98,15 %	99,63 %
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			24.394.000	25.936.000			23.959.600	25.639.200			98,22 %	98,86 %

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.		10.080.000	6.903.000	15.158.000		9.788.000	6.821.400	13.179.200		97,10 %	98,82 %	86,95 %
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		10.080.000	6.903.000	15.158.000		9.788.000	6.821.400	13.179.200		97,10 %	98,82 %	86,95 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	30.223.510	61.152.000	72.066.440	277.022.000	29.660.800	58.328.600	70.284.400	276.254.800	98,14 %	95,38 %	97,53 %	99,72 %

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	14.206.610	12.432.000	15.618.340	205.307.000	13.761.000	12.407.000	15.545.200	204.719.400	96,86%	99,80%	99,53%	99,71%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.206.610	12.432.000	15.618.340	205.307.000	13.761.000	12.407.000	15.545.200	204.719.400	96,86%	99,80%	99,53%	99,71%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.	16.016.900	48.720.000	56.448.100	71.715.000	15.899.800	45.921.600	54.739.200	71.535.400	99,27%	94,26%	96,97%	99,75%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		36.288.000	36.497.140			33.490.000	35.645.200			92,29%	97,67%	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16.016.900	12.432.000	17.569.560	57.372.000	15.899.800	12.431.600	16.715.400	57.226.000	99,27%	100,00%	95,14%	99,75%
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatn teknologi tepat guna			2.381.400	14.343.000			2.378.600	14.309.400			99,88%	99,77%

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	88.082.796	21.872.000	37.762.652	80.910.098	75.196.100	20.414.700	37.438.400	80.013.600	85,37 %	93,34 %	99,14 %	98,89 %
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina.	88.082.796	21.872.000	37.762.652	80.910.098	75.196.100	20.414.700	37.438.400	80.013.600	85,37 %	93,34 %	99,14 %	98,89 %
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			18.139.000	56.480.169			17.815.000	55.944.000			98,21 %	99,05 %
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.793.600	10.080.000			10.610.800	9.788.000			98,31 %	97,10 %		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	20.000.000		4.693.000		9.651.800		4.693.000		48,26 %		100,00%	

Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran pada tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Pemilihan Kepala Desa												
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa	13.095.000	11.792.000	14.930.652	24.429.929	11.387.500	10.626.700	14.930.400	24.069.600	86,96%	90,12%	100,00%	98,53%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000				9.738.800				97,39%			
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	34.194.196				33.807.200				98,87%			
Jumlah		4.814.686.947	5.470.751.000	5.050.253.220	6.114.348.632	4.072.628.244	4.980.858.918	4.666.374.635	5.666.917.279	84,59%	91,05%	92,40%	92,68%

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Ciparay, Tahun 2021 s.d 2024

Capaian anggaran di tahun 2021 sebesar 84,59 % dengan efisiensi sebesar 15,41%. Penyebab capaian kurang dari 90% yaitu di tahun 2021 terjadi pandemi Covid 19 sehingga kegiatan yang direncanakan tidak berjalan maksimal. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, capaian anggaran melebihi 90% karena sudah stabilnya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Meski demikian, efisiensi dari tahun ke tahun tetap ada dan kinerja tetap terealisasi 100%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Ciparay

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Ciparay dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi Bupati Bandung.

Pelaksanaan tugas pokok camat sebagai perangkat daerah adalah membantu bupati dalam bidang pemerintahan daerah yang kegiatannya mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, meliputi bidang-bidang:

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Urusan Sosial
5. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Urusan Pertanahan
7. Urusan Lingkungan Hidup
8. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Urusan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Penanaman Modal
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
14. Urusan Kebudayaan
15. Urusan Pariwisata
16. Urusan Pertanian

Secara umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dikategorikan, sebagai berikut:

a. Warga Masyarakat Umum

   Kelompok ini merupakan penerima utama layanan administrasi dasar, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan publik.

b. Kelompok Rentan

   Kelompok ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan korban bencana. Mereka menjadi sasaran prioritas dalam program bantuan sosial, akses layanan publik yang inklusif, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Pemerintah Desa

   Sasaran layanan ini berkaitan dengan dukungan teknis dan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemberian rekomendasi dalam rangka pencairan keuangan desa, pembinaan kelembagaan, serta fasilitasi koordinasi program pembangunan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2.1.5 Mitra Kecamatan Ciparay dalam Pemberian Pelayanan

Kedudukan kecamatan sebagai pelayanan publik terdepan serta sebagai pelaksana pelimpahan kewenangan bupati, tidak terlepas dari sinergitas dan kemitraan dengan pihak dinas/lembaga/unsur terkait. Sinergitas dan kemitraan membantu pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi berbagai kegiatan, mulai dari penyusunan peraturan hingga administrasi tata pemerintahan desa serta kelancaran pembangunan daerah.

Mitra terdekat dengan kecamatan adalah TNI/Koramil dan POLRI/Polsek yang tergabung dalam Forkopimcam, desa, lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat, agama dan kepemudaan serta pihak swasta. Secara vertical kecamatan juga membutuhkan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi dalam pemberian pelayanan, diantaranya yaitu: Disdukcapil, DPMD, Dinsos, Dinkes, Bapperida, BKAD, DLH, dan lain sebaginya.

Kerja sama dengan berbagai pihak dapat membuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan lebih efisien. Kemitraan memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan memberikan pelayanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ciparay

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target baik berupa faktor pendukung maupun faktor kendala pencapaian sebagai bahan perumusan permasalahan pelayanan kecamatan untuk ditangani pada tahun yang akan datang.

Identifikasi permasalahan didapat pada pelayanan publik dengan standar prima dan profesionalisme aparatur pemerintahan, serta pengembangan antusiastik masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Ciparay.

Program pembangunan harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana dalam Renstra serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun, berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran periode 2025-2029 pada Renstra Kecamatan Ciparay, di bawah ini:

1. Kurangnya jumlah pegawai yang mendukung kinerja kecamatan
2. Belum optimalnya jalan lingkungan dan jalan antar desa, khususnya pada jalur-jalur penghubung antar desa yang rusak berat dan menjadi akses vital masyarakat
3. Belum optimalnya pengembangan drainase dan saluran air, sebagai bagian dari penanganan banjir dan pengendalian genangan air di titik-titik rawan seperti sekitar Pasar Ciparay dan area perumahan padat penduduk
4. Belum optimalnya sarana prasarana penunjang kantor kecamatan dan desa, termasuk ruang pelayanan publik yang representatif dan ramah disabilitas
5. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah

Kecamatan Ciparay sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis Kecamatan Ciparay dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Ciparay yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya-upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Ciparay, antara lain sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pendidikan dan pelatihan

2. Pengusulan personil berdasarkan peta jabatan
3. Pemeliharaan jalan secara swadaya
4. Pemeliharaan lingkungan oleh warga sekitar
5. Pemanfaatan efektif dari sarana yang ada
6. Mengadakan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan kepada masyarakat
7. Sinergitas yang baik dengan pihak terkait terutama dengan perangkat daerah vertikal

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berfokus pada pencapaian tiga sasaran utama: penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, RPJMN ini menjadi dasar hukum perencanaan pembangunan lima tahun mendatang, memuat Prioritas Nasional (Asta Cita) yang selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045, serta menjadi panduan bagi K/L, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam implementasi pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kecamatan Ciparay dalam mendukung RPJMN telah memuat 6 (enam) program kegiatan, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2025-2030 yang hendak dicapai, adalah: Terwujudnya Kabupaten Bandung lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bandung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Bandung yang Bedas, Maju dan Berkelanjutan tersebut, maka di rumuskan 5 (lima) Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung 2025-2030, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan
3. Mengoptimalkan tatakelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
5. Menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum

Sebagai salah satu perangkat daerah, maka Kecamatan Ciparay berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dengan modal semangat dan kerjasama selama ini pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan meskipun dengan hasil yang belum optimal.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan. Rencana tata ruang dan tata wilayah Kecamatan Ciparay telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044.

Kecamatan Ciparay merupakan salah satu kecamatan yang direncanakan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau kawasan perkotaan yang melayani skala internasional dan nasional. Kecamatan Ciparay masuk Kawasan Bandung Selatan yang selanjutnya disingkat KBS, terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Bandung (Soreang), mempunyai luas wilayah ± 5.366,72 Ha, dengan jarak kurang lebih 33 km dari Pemerintah Kabupaten dan merupakan salah satu kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung. Kecamatan Ciparay dengan kemiringan 0 - <8% (datar), sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan usaha tani lahan sawah. Kecamatan Ciparay memiliki jasa ekosistem penyedia pangan yang dominan pada kategori tinggi.

Secara geografis Kecamatan Ciparay terletak pada 107° 32 ‘ - 107°39 ‘ Bujur Timur dan 7° 00’ - 7° 80 ‘ Lintang Selatan, sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar wilayah di Kecamatan Ciparay merupakan daerah dataran dengan ketinggian diatas permukaan laut bervariasi dari 683 m sampai 795 m. Sebagian desa terletak diluar hutan, tetapi ada satu desa yang memiliki hutan yaitu Desa Babakan.

Kecamatan Ciparay dialiri oleh beberapa sungai yaitu Sungai Cirasea dan Sungai Citarum. Keberadaan sungai ini sangat menguntungkan dari sektor pertanian. Selain untuk sektor pertanian tanaman pangan keberadaan

sungai itu juga di manfaatkan untuk sektor perikanan, tetapi apabila curah hujan cukup tinggi di daerah- daerah tertentu akan terjadi banjir dan tanah longsor.

Kecamatan Ciparay merupakan salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Bandung. Dengan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, khususnya di wilayah pedesaan, yang mana berimbas pada konversi lahan sawah terhadap lahan permukiman di wilayah pedesaan di Kecamatan Ciparay. Wilayah persawahan di Kecamatan Ciparay berada di Desa Sumbersari, Desa Ciparay, Desa Sarimahi, Desa Sagaracipta, Desa Cikoneng

Dalam kaitan dengan transportasi Kecamatan Ciparay memiliki terminal penumpang tipe C yang berada di pusat kota Kecamatan Ciparay berdampingan dengan Alun-Alun Ciparay. Selain itu, Kecamatan Ciparay masuk ke dalam lintasan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Bandung Selatan-Mandirancan, SUTET Bandung Selatan–New Ujung Berung. Kecamatan Ciparay dilintasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Wayang Windu-Bandung Selatan, SUTT Cigereleng-Majalaya.

Kaitan dengan sarana penunjang bagi masyarakat, Kecamatan Ciparay memiliki sistem jaringan telekomunikasi jaringan tetap, sistem jaringan sumber daya air berupa jaringan irigasi primer dan sekunder, jaringan pengendalian banjir, jaringan drainase primer dan sekunder, badan air, kawasan hutan lindung, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan Perkebunan, kawasan peternakan, kawasan peruntukan industri.

Kecamatan Ciparay berperan sebagai wilayah penyangga bagi Kecamatan Majalaya. Banyak karyawan yang bekerja di Majalaya memilih untuk tinggal di Kecamatan Ciparay karena lokasinya yang berdekatan. Hal ini mendorong pertumbuhan pemukiman dan aktivitas komersial di sepanjang jalur utama yang menghubungkan kedua kecamatan ini.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

KLHS akan memuat perkiraan dampak dan risiko lingkungan dari berbagai skenario pembangunan yang mungkin memengaruhi kecamatan. Analisis KLHS terkait pelayanan kecamatan melibatkan peninjauan dokumen KLHS untuk memastikan bahwa rekomendasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan di wilayah kecamatan. Tujuannya adalah menilai sejauh mana KLHS secara strategis mempertimbangkan dampak lingkungan, efisiensi sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam mendukung layanan publik dan pembangunan kecamatan.

Isu KLHS yang relevan dengan Kecamatan Ciparay, yakni:

1. Pembangunan yang berdampak lingkungan dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan perlu menambah jalan lingkar
2. Masyarakat belum memiliki kesadaran akan pemeliharaan lingkungan
3. Tata ruang sapras desa belum optimal dan tidak mempunyai *blueprint* perencanaan tata ruang

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ciparay

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target baik berupa faktor pendukung maupun faktor kendala pencapaian sebagai bahan perumusan permasalahan pelayanan kecamatan untuk ditangani pada tahun yang akan datang. Identifikasi permasalahan didapat pada pelayanan publik dengan standar prima dan profesionalisme aparatur pemerintahan, serta pengembangan antusiastik masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Ciparay.

Program pembangunan harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana dalam Renstra serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan identifikasi permasalahan pada matrik berikut:

Tabel 2.14

Matrik Permasalahan Kecamatan

No	Potensi Kecamatan	Permasalahan	Kondisi Eksisting	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Akar Masalah	Saran Kegiatan	PD Penanggung Jawab
1	Ketersediaan posisi jabatan yang masih belum terisi yang dapat mendukung kinerja untuk lebih baik lagi bagi organisai pemerintahan kecamatan	Kurangnya jumlah pegawai yang mendukung kinerja kecamatan	Jumlah pegawai pelaksana di setiap seksi kurang	Kecamatan Ciparay	Kurangnya pegawai	Pemenuhan jumlah pegawai	BKPSDM
2	Lokasi geografis yang strategis, serta potensi sumber daya dan ekonomi yang dapat ditukar antar kecamatan serta daerah rawan kemacetan di pusat kota Ciparay	Dengan lokasi yang sangat strategis dan menjadi perlintasan antar kecamatan serta belum optimalnya Jalan Lingkungan dan Jalan Antar Desa, khususnya pada jalur-jalur penghubung antar desa yang rusak berat dan menjadi akses vital Masyarakat	Masih banyak angkot dan kendaraan lainnya yang parkir di bahu jalan serta genangan air yang merusak jalan akibat sistem drainase yang tidak memadai	Desa pakutandang, Desa Sarimahi, Desa Ciparay	Kurangnya penataan dan kesadaran masyarakat	Penguatan regulasi/ tupoksi/peruntukan	Dinas Perhubungan
3	Masyarakat dengan karakteristik yang beragam	Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah	masih banyak sampah di pinggir jalan	Desa Sarimahi, Desa Gunungleutik	Belum ada TPS	Penegakan Perda dan kegiatan kerja bakti (bersih lingkungan)	DLH

No	Potensi Kecamatan	Permasalahan	Kondisi Eksisting	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Akar Masalah	Saran Kegiatan	PD Penanggung Jawab
4	Potensi rawan banjir apabila hujan deras dan kekeringan jika musim kemarau	Belum optimalnya Pengembangan Drainase dan Saluran Air, sebagai bagian dari penanganan banjir dan pengendalian genangan air serta akses air untuk pengairan area irigasi untuk pertanian	saluran air sempit, dangkal dan tersumbat	Desa pakutandang, Desa Sarimahi, Desa Manggungharja	Saluran air dangkal dan tertutup, terutama oleh toko-toko yang hampir tidak memiliki ijin, perubahan lingkungan seperti kurangnya sumber daya air akibat musim kering	Netralisasi saluran, jembatan penghubung ditinggikan, perbaikan sarana pengairan terutama untuk pengairan	PUTR dan DLH
5	Jumlah desa terbanyak se Kabupaten Bandung	Belum optimalnya Sarana Prasarana Penunjang Kantor Kecamatan dan Desa, termasuk ruang pelayanan publik yang representatif dan ramah disabilitas	Sarana dan prasarana belum lengkap	Kecamatan Ciparay dan Desa se Kecamatan Ciparay	Sarana dan prasarana belum optimal sehingga banyak yang harus diperbaiki	Diadakannya ruang tunggu yang ideal, perpustakaan, ruang menyusui dan taman bermain anak	Dispusip, DPMD, Bapperida, BKAD

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciparay, 2025

Permasalahan sesuai dengan sasaran periode 2025-2029 pada Renstra Kecamatan Ciparay, di bawah ini:

1. Kurangnya jumlah pegawai yang mendukung kinerja kecamatan
2. Dengan lokasi yang sangat strategis dan menjadi perlintasan antar kecamatan serta belum optimalnya jalan lingkungan dan jalan antar desa, khususnya pada jalur-jalur penghubung antar desa yang rusak berat dan menjadi akses vital masyarakat
3. Belum optimalnya pengembangan drainase dan saluran air, sebagai bagian dari penanganan banjir dan pengendalian genangan air serta akses air untuk pengairan area irigasi untuk pertanian
4. Belum optimalnya sarana prasarana penunjang kantor kecamatan dan desa, termasuk ruang pelayanan publik yang representatif dan ramah disabilitas
5. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah

Upaya-upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Ciparay, antara lain sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama melalui pendidikan dan pelatihan
2. Pengusulan personil berdasarkan peta jabatan
3. Pemeliharaan jalan secara swadaya
4. Pemeliharaan lingkungan oleh warga sekitar
5. Pemanfaatan efektif dari sarana yang ada
6. Mengadakan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan kepada masyarakat
7. Sinergitas yang baik dengan pihak terkait terutama dengan perangkat daerah vertikal

2.2.6 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah kerja terdapat isu-isu strategis yang muncul, yaitu:

1. Peningkatan SDM yang mendukung kinerja kecamatan
2. Optimalisasi jalan lingkungan dan jalan antar desa, khususnya pada jalur-jalur penghubung antar desa yang rusak berat dan menjadi akses vital masyarakat
3. Optimalisasi pengembangan drainase dan saluran air, sebagai bagian dari penanganan banjir dan pengendalian genangan air di titik-titik rawan seperti sekitar Pasar Ciparay dan area perumahan padat penduduk
4. Optimalisasi sarana prasarana penunjang kantor kecamatan dan desa, termasuk ruang pelayanan publik yang representatif dan ramah disabilitas
5. Optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah

Secara garis besar dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Ciparay

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Kecamatan Ciparay	Isu Lingkungan Yang Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan posisi jabatan yang masih belum terisi yang dapat mendukung kinerja untuk lebih baik lagi bagi organisai pemerintahan kecamatan	Kurangnya jumlah pegawai yang mendukung kinerja kecamatan	Tidak optimal tata Kelola yang baik dan kerentanan lingkungan hidup yang menunjukan adanya kelemahan dalam administrasi dan manajemen SDM	Ketidak merataan jumah pegawai	Ketidaksesuaian kompetensi dan jumlah pegawai	Jumlah pegawai masih kurang dan belum merata	Peningkatan SDM yang mendukung kinerja kecamatan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Kecamatan Ciparay	Isu Lingkungan Yang Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lokasi geografis yang strategis, serta potensi sumber daya dan ekonomi yang dapat ditukar antar kecamatan serta daerah rawan kemacetan di pusat kota Ciparay	Dengan lokasi yang sangat strategis dan menjadi perlintasan antar kecamatan serta belum optimalnya Jalan Lingkungan dan Jalan Antar Desa, khususnya pada jalur-jalur penghubung antar desa yang rusak berat dan menjadi akses vital Masyarakat	Pembangunan yang berdampak lingkungan dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan perlu menambah jalan lingkar	Pembangunan berwawasan lingkungan	Kesejahteraan masyarakt	Alih pungsi lahan	Optimalisasi Jalan Lingkungan dan Jalan Antar Desa, khususnya pada jalur-jalur penghubung antar desa yang rusak berat dan menjadi akses vital Masyarakat
Masyarakat dengan karakteristik yang beragam	Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah	Masyarakat belum memiliki kesadaran akan pemeliharaan lingkungan	Volume sampah meningkat dengan pengelolaan yang tidak baik	Volume sampah meningkat	Penumpukan sampah yang menjadi permasalahan di setiap wilayah	Optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Kecamatan Ciparay	Isu Lingkungan Yang Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi rawan banjir apabila hujan deras dan kekeringan jika musim kemarau	Belum optimalnya Pengembangan Drainase dan Saluran Air, sebagai bagian dari penanganan banjir dan pengendalian genangan air serta akses air untuk pengairan area irigasi untuk pertanian	Masyarakat belum memiliki kesadaran akan pemeliharaan lingkungan	Infrastruktur drainase yang tidak memadai dan urbanisasi yang tidak terencana	Pendangkalan saluran, tersumbat sampah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga drainase	Masih adanya wilayah yang terkena banjir	Optimalisasi Pengembangan Drainase dan Saluran Air
Jumlah desa terbanyak se Kabupaten Bandung	Belum optimalnya Sarana Prasarana Penunjang Kantor Kecamatan dan Desa, termasuk ruang pelayanan publik yang representatif dan ramah disabilitas	Tata ruang sapras desa belum optimal dan tidak mempunyai *blueprint* perencanaan tata ruang	tantangan pengadaan dan perawatan yang efisien dalam mendukung sarana dan prasarana untuk produktivitas dan efektivitas kerja	ketidakmemadainya sarana dan prasarana, keterbatasan teknologi, kurangnya perawatan dan pemeliharaan	ketersediaan dan kualitas sarana yang belum memadai, pengelolaan dan pemeliharaan yang kurang baik	Optimalisasi Sarana Prasarana Penunjang Kantor Kecamatan dan Desa, termasuk ruang pelayanan publik yang representatif dan ramah disabilitas

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciparay, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan pada bab sebelumnya serta tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2029 yang menjadi tugas Kecamatan Ciparay dalam menyelenggarakan kebijakan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tujuan dan sasaran dalam Renstra berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penentuan tujuan dan sasaran harus bersifat terukur, sehingga dapat dievaluasi secara objektif melalui indikator yang telah ditetapkan.

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Ciparay adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Sasaran memuat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program-program yang dapat mendukung tujuan Kecamatan Ciparay. Untuk mewujudkan tujuan, dirumuskan sasaran yang ingin dicapai di Kecamatan Ciparay, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ciparay beserta indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ciparay

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,01 persen	0,22 persen	0,24 persen	0,25 persen	0,26 persen	0,27 persen	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Nilai IKM	89,99 poin	90,19 poin	90,41 poin	90,64 poin	90,88 poin	91,13 poin	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Ciparay, 2025

Berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator di atas, maka dapatlah ditentukan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ciparay yaitu Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3.2 Strategi Kecamatan Ciparay dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran perangkat daerah. penahapan renstra adalah berikut ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Ciparay

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciparay, 2025

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Ciparay dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ciparay untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ciparay yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bandung. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Ciparay menunjukkan bagaimana Kecamatan Ciparay mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Kecamatan Ciparay, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Ciparay.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai oleh Kecamatan Ciparay periode tahun 2025-2029 yakni sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Ciparay

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciparay,2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Pada Bab sebelumnya telah diuraikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Ciparay yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Program yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Tujuan Kecamatan Ciparay pada periode Renstra ini, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan sasarannya, yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan. Indikator sasarannya yaitu IKM.

Berikut Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan periode 2025-2029 dilampirkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecamatan Ciparay

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Laju Indeks Kepuasan masyarakat		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan			Nilai IKM		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu / Total Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun) x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan validata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daera	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun) x100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun) x100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi BMD yang terkelola dengan baik / Jumlah Administrasi BMD
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi) x100%
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainny	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Aset Barang Milik Daerah / Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik) x100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan / koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraa		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
			n urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan				
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyrakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
							100%
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan *monitoring* dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	persentase desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x100%
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang ifasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan Desk Bapperida

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayaan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan indikator kinerja kecamatan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kedalam Rencana Strategis Kecamatan Ciparay, diidentifikasi indikator kinerja yang bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Kecamatan Ciparay. Indikator kinerja tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ciparay yaitu Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Keberhasilan pelaksanaan indikator dari program/kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari anggaran yang mendukung kelancaran indikator tersebut. Tabel berikut adalah pendanaan yang mendukung:

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang/Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target Dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	N/A	- 61,00 poin - 44,15 poin	5.114.529.160,00	- 64,00 poin - 44,25 poin	5.122.904.080,00	- 67,00 poin - 44,35 poin	5.122.904.080,00	- 71,00 poin - 44,45 poin	5.122.904.080,00	- 71,50 poin - 44,55 poin	5.122.904.080,00	S.3.1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	77,30 poin	78,50 poin	34.137.200,00	79,00 poin	34.137.200,00	79,50 poin	34.137.200,00	80,00 poin	34.137.200,00	80,50poin	34.137.200,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	14.840.000,00	6 dokumen	14.840.000,00	6 dokumen	14.840.000,00	6 dokumen	14.840.000,00	6 dokumen	14.840.000,00	
Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	2 Dokumen	641.800,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	14.840.000,00	6 laporan	14.840.000,00	6 laporan	14.840.000,00	6 laporan	14.840.000,00	6 laporan	14.840.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	630.000,00	6 laporan	630.000,00	6 laporan	630.000,00	6 laporan	630.000,00	6 laporan	630.000,00	

Bidang/Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target Dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1 dokumen	630.000,00	1 dokumen	630.000,00	1 dokumen	630.000,00	1 dokumen	630.000,00	1 dokumen	630.000,00	
pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	56 data	630.000,00	56 data	630.000,00	56 data	630.000,00	56 data	630.000,00	56 data	630.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	4.385.277.000,00	100%	4.385.377.000,00	100%	4.385.377.000,00	100%	4.385.377.000,00	100%	4.385.377.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 orang/ bulan	228 orang/ bulan	4.384.017.000,00	228 orang/ bulan	4.384.017.000,00	228 orang/ bulan	4.384.017.000,00	228 orang/ bulan	4.384.017.000,00	228 orang/ bulan	4.384.017.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2 laporan	630.000,00	2 laporan	680.000,00	2 laporan	680.000,00	2 laporan	680.000,00	2 laporan	680.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	6 laporan	630.000,00	6 laporan	680.000,00	6 laporan	680.000,00	6 laporan	680.000,00	6 laporan	680.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100%	100%	79.320.000,00	100%	78.980.000,00	100%	78.980.000,00	100%	78.980.000,00	100%	78.980.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	21 paket	21.000.000,00	21 paket	21.000.000,00	21 paket	21.000.000,00	21 paket	21.000.000,00	21 paket	21.000.000,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	3 dokumen	1.020.000,00	3 dokumen	680.000,00	3 dokumen	680.000,00	3 dokumen	680.000,00	3 dokumen	680.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	87 orang	28.650.000,00	87 orang	28.650.000,00	87 orang	28.650.000,00	87 orang	28.650.000,00	87 orang	28.650.000,00	

Bidang/Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target Dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	87 orang	28.650.000,00	87 orang	28.650.000,00	87 orang	28.650.000,00	87 orang	28.650.000,00	87 orang	28.650.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,50%	100%	181.842.117,00	100%	202.084.112,00	100%	202.084.112,00	100%	202.084.112,00	100%	202.084.112,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	11 paket	6.996.800,00	11 paket	6.996.800,00	11 paket	6.996.800,00	11 paket	6.996.800,00	11 paket	6.996.800,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 paket	21 paket	99.997.400,00	21 paket	121.739.395,00	21 paket	121.739.395,00	21 paket	121.739.395,00	21 paket	121.739.395,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 paket	13 paket	2.995.800,00	13 paket	2.995.800,00	13 paket	2.995.800,00	13 paket	2.995.800,00	13 paket	2.995.800,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1 paket	7.852.117,00	1 paket	7.852.117,00	1 paket	7.852.117,00	1 paket	7.852.117,00	1 paket	7.852.117,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	20 dokumen	3.000.000,00	10 dokumen	1.500.000,00	10 dokumen	1.500.000,00	10 dokumen	1.500.000,00	10 dokumen	1.500.000,00	
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	-	4 laporan	1.000.000,00	4 laporan	1.000.000,00	4 laporan	1.000.000,00	4 laporan	1.000.000,00	4 laporan	1.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195 laporan	331 laporan	60.000.000,00	331 laporan	60.000.000,00	331 laporan	60.000.000,00	331 laporan	60.000.000,00	331 laporan	60.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	296.147.768,00	100%	296.147.768,00	100%	296.147.768,00	100%	296.147.768,00	100%	296.147.768,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 laporan	1.400.000,00	2 laporan	1.400.000,00	2 laporan	1.400.000,00	2 laporan	1.400.000,00	2 laporan	1.400.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	43.194.168,00	12 laporan	43.194.168,00	12 laporan	43.194.168,00	12 laporan	43.194.168,00	12 laporan	43.194.168,00	

Bidang/Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target Dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	251.553.600,00	12 laporan	251.553.600,00	12 laporan	251.553.600,00	12 laporan	251.553.600,00	12 laporan	251.553.600,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100%	100%	2.040.000,00	100%	1.360.000,00	100%	1.360.000,00	100%	1.360.000,00	100%	1.360.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	1.020.000,00	4 laporan	680.000,00	4 laporan	680.000,00	4 laporan	680.000,00	4 laporan	680.000,00	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	1.020.000,00	4 laporan	680.000,00	4 laporan	680.000,00	4 laporan	680.000,00	4 laporan	680.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	24.972.200,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	11 unit	14.986.600,00	2 unit	15.000.000,00	2 unit	15.000.000,00	2 unit	15.000.000,00	2 unit	15.000.000,00	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	4 unit	9.985.600,00	4 unit	10.000.000,00	4 unit	10.000.000,00	4 unit	10.000.000,00	4 unit	10.000.000,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-											
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	100%	110.792.875,00	100%	99.818.000,00	100%	99.818.000,00	100%	99.818.000,00	100%	99.818.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	74.578.000,00	11 unit	74.578.000,00	11 unit	74.578.000,00	11 unit	74.578.000,00	11 unit	74.578.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	8 unit	5.240.000,00	8 unit	5.240.000,00	8 unit	5.240.000,00	8 unit	5.240.000,00	8 unit	5.240.000,00	
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantoir dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	1 unit	30.974.875,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	

Bidang/Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target Dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100%	100%	440.305.900,00	100%	282.790.200,00	100%	636.287.000,00	100%	656.494.050,00	100%	1.021.837.770,00	S.3.1
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	100%	100%	6.500.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan	3.250.000,00	1 laporan	4.000.000,00	1 laporan	4.000.000,00	1 laporan	4.000.000,00	1 laporan	4.000.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	100%	100%	12.675.000,00	100%	9.000.000,00	100%	9.000.000,00	100%	9.000.000,00	100%	9.000.000,00	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	1 dokumen	4.875.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	3.900.000,00	1 laporan	3.000.000,00	1 laporan	3.000.000,00	1 laporan	3.000.000,00	1 laporan	3.000.000,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2 laporan	3.900.000,00	2 laporan	3.000.000,00	2 laporan	3.000.000,00	2 laporan	3.000.000,00	2 laporan	3.000.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.	100%	100%	86.385.000,00	100%	22.000.000,00	100%	17.000.000,00	100%	17.000.000,00	100%	17.000.000,00	

Bidang/Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target Dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2026		2026		2026		2026		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	10 Dokumen	86.385.000,00	3 Dokumen	22.000.000,00	3 Dokumen	17.000.000,00	3 Dokumen	17.000.000,00	3 Dokumen	17.000.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan.	100%	100%	334.745.900,00	100%	243.790.200,00	100%	602.287.000,00	100%	622.494.050,00	100%	987.837.770,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	1 dokumen	6.860.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13 laporan	23 laporan	327.885.900,00	14 laporan	240.790.200,00	20 laporan	599.287.000,00	25 laporan	619.494.050,00	25 laporan	984.837.770,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	128.415.400,00	100%	85.500.000,00	100%	85.500.000,00	100%	85.500.000,00	100%	85.500.000,00	S.3.1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	100%	100%	128.415.400,00	100%	85.500.000,00	100%	85.500.000,00	100%	85.500.000,00	100%	85.500.000,00	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	335 orang	49.665.400,00	200 orang	37.250.000,00	200 orang	37.250.000,00	200 orang	37.250.000,00	200 orang	37.250.000,00	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	600 orang	840 orang	47.100.000,00	200 orang	20.500.000,00	200 orang	20.500.000,00	200 orang	20.500.000,00	200 orang	20.500.000,00	
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1 laporan	1 laporan	3.900.000,00	1 laporan	3.250.000,00	1 laporan	3.250.000,00	1 laporan	3.250.000,00	1 laporan	3.250.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	12 Dokumen	12 Dokumen	27.750.000,00	12 Dokumen	24.500.000,00	12 Dokumen	24.500.000,00	12 Dokumen	24.500.000,00	12 Dokumen	24.500.000,00	

Bidang/Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target Dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2026		2026		2026		2026		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	161.231.000,00	100%	43.000.000,00	100%	43.000.000,00	100%	43.000.000,00	100%	43.000.000,00	S.3.1
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	100%	100%	135.806.000,00	100%	28.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	28.000.000,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 laporan	5 laporan	77.625.000,00	2 laporan	10.000.000,00	2 laporan	10.000.000,00	2 laporan	10.000.000,00	2 laporan	10.000.000,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	4 laporan	58.181.000,00	4 laporan	18.000.000,00	4 laporan	18.000.000,00	4 laporan	18.000.000,00	4 laporan	18.000.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	100%	100%	25.425.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	3 laporan	25.425.000,00	2 laporan	15.000.000,00	2 laporan	15.000.000,00	2 laporan	15.000.000,00	2 laporan	15.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100%	36,36%	200.621.000,00	36,36%	104.375.300,00	36,36%	104.375.300,00	36,36%	104.375.300,00	36,36%	104.375.300,00	S.3.1
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	100%	100%	113.051.000,00	100%	51.665.300,00	100%	51.665.300,00	100%	51.665.300,00	100%	51.665.300,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	8 laporan	113.051.000,00	3 laporan	51.665.300,00	3 laporan	51.665.300,00	3 laporan	51.665.300,00	3 laporan	51.665.300,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi.	100%	100%	16.710.000,00	100%	16.710.000,00	100%	16.710.000,00	100%	16.710.000,00	100%	16.710.000,00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	1 laporan	8.420.000,00	1 laporan	8.420.000,00	1 laporan	8.420.000,00	1 laporan	8.420.000,00	1 laporan	8.420.000,00	

Bidang/Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target Dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2026		2026		2026		2026		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	1 laporan	8.290.000,00	1 laporan	8.290.000,00	1 laporan	8.290.000,00	1 laporan	8.290.000,00	1 laporan	8.290.000,00	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	100%	70.860.000,00	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	109 keluarga	25.320.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang MengikutPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	109 keluarga	25.320.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	108 keluarga	10.110.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	108 keluarga	10.110.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	50 keluarga	9.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan *monitoring* dan evaluasi pemerintahan desa		100%	92.575.000,00	100%	268.000.000,00	100%	73.000.000,00	100%	133.000.000,00	100%	73.000.000,00	S.3.1
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina dan diawasi		100%	92.575.000,00	100%	268.000.000,00	100%	73.000.000,00	100%	133.000.000,00	100%	73.000.000,00	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		2 Dokumen	13.490.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen	3.900.000,00	1 Dokumen	3.900.000,00	1 Dokumen	3.900.000,00	1 Dokumen	3.900.000,00	1 Dokumen	3.900.000,00	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		2 Dokumen	13.490.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	

Bidang/Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target Dan Pagu Indikator Tahun										Ket
			2026		2026		2026		2026		2026		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		1 laporan	6.600.000,00	1 laporan	4.000.000,00	1 laporan	4.000.000,00	1 laporan	4.000.000,00	1 laporan	4.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-	10 dokumen	200.000.000,00			3 dokumen	60.000.000,00		-	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		2 Dokumen	51.195.000,00	2 Dokumen	44.200.000,00	2 Dokumen	44.200.000,00	2 Dokumen	44.200.000,00	2 Dokumen	44.200.000,00	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 laporan	3.900.000,00	1 laporan	3.900.000,00	1 laporan	8.900.000,00	1 laporan	8.900.000,00	1 laporan	8.900.000,00	
Jumlah Total				6.137.677.460,00		5.906.569.580,00		6.065.066.380,00		6.145.273.430,00		6.450.617.150,00	

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, RPJMD dan Desk Bapperida

Ket:

S.3.1= Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam 5 tahun Renstra ini Kecamatan Ciparay telah menentukan program prioritas yang mendukung terhadap pembangunan daerah. Hal tersbut terdapat dalam tabel, berikut ini:

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Ciparay, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui IKU PD

Berdasarkan indikator kinerja kecamatan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kedalam Rencana Strategis Kecamatan Ciparay, diidentifikasi indikator kinerja yang bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Kecamatan Ciparay. Indikator Kinerja tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ciparay yaitu Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ciparay

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	0,01	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciparay,2025

Dalam mengukur serta menilai keberhasilan Kecamatan Ciparay atau program dalam mencapai tujuannya serta mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kecamatan Ciparay telah menentukan Indikator Kinerja Utama yaitu Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan dari target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Laju IKM ini dianggap kecil karena mencapai Nilai IKM yang tepat masih dalam proses berkelanjutan, sehingga diharapkan ke depannya indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan.

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Dengan menetapkan IKK, Kecamatan Ciparay dapat mengukur pencapaian sasaran strategis, memantau efektivitas

program, serta mengevaluasi efisiensi pemanfaatan anggaran dan sumber daya. Setiap IKK dirancang sehingga mencerminkan *output* dan *outcome* yang spesifik serta selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah. Melalui pengendalian dan evaluasi secara berkala, Kecamatan Ciparay memperoleh umpan balik objektif untuk memperbaiki kebijakan, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mempertanggungjawabkan kinerja kepada Kepala daerah dan publik. Dengan demikian, IKK tidak hanya menjadi tolok ukur capaian pemerintah kecamatan, tetapi juga instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Ciparay tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	0,01	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Ciparay,2025

Laju IKM sebagai IKK ini dianggap kecil karena mencapai Nilai IKM yang tepat masih dalam proses berkelanjutan, sehingga diharapkan ke depannya indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan.

BAB V
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Sebagai penutup dari Perencanaan Strategis tahun 2025-2029 Kecamatan Ciparay dapat disampaikan bahwa dengan disusunnya Renstra, besar harapan untuk masa yang akan datang akan memerlihatkan pencapaian kinerja yang maksimal, mengingat Kecamatan Ciparay dituntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran-sasaran strateginya dan sekaligus menunjukan adanya komitmen kecamatan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bandung “Terwujudnya Kabupaten Bandung lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra ini merupaan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Oleh karena itu, konsistensi, kerja sama, transparansi, inovasi, serta tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini. Kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029
b. Penyusunan Renja Kecamatan Ciparay Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029
c. Penyusunan Renstra Kecamatan Ciparay Tahun 2025-2029 telah melalui konsultasi dan koordinasi serta verifikasi oleh Bapperida Kabupaten Bandung

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Renstra Kecamatan Ciparay tahun 2025-2029 dijabarkan dalam Renja tahun 2026 sampai tahun 2029, yang mencakup prioritas, program, kegiatan, sub kegiatan dna pendanaan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung. Kecamatan Ciparay wajib betanggungjawab menjaga konsistensi antara Renstra dan Renja untuk memastikan pelaksanaan program yang selaras, terarah dan sesuai regulasi.

Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Ciparay mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. Seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Ciparay dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh seluruh aparatur Kecamatan Ciparay.

Soreang, Oktober 2025

CAMAT CIPARAY

ttd

ANJAR LUGIYANA

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Aset Kecamatan Ciparay	24
Tabel 2.2	Status Kepegawaian berdasarkan jenis kelamin pada Kantor Kecamatan Ciparay.....	25
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kecamatan Ciparay Tahun 2025	28
Tabel 2.5	Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2025	29
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Ciparay	31
Tabel 2.7	Jumlah dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2025	32
Tabel 2.8	Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2026-2029	32
Tabel 2.9	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ciparay, 2023/2024 dan 2024/2025	33
Tabel 2.10	Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Ciparay, 2023/2024 dan 2024/2025	34
Tabel 2.11	Indikator Kinerja Utama (IKU) periode Renstra Tahun 2021-2024	36
Tabel 2.12	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Ciparay Tahun 2021-2024	37
Tabel 2.13	Hasil Evaluasi Capaian Anggaran Tahun 2021-2024	50
Tabel 2.14	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ciparay Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	75
Tabel 2.15	Matrik Permasalahan Kecamatan	79
Tabel 3.1	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Ciparay	83
Tabel 3.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ciparay	84
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Kecamatan Ciparay	85
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Kecamatan Ciparay	87
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan ...	104

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 113
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ciparay 114
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan 24
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Ciparay 27